

MENAKER IDA FAUZIYAH MINTA

Perusahaan dan Pekerja Patuhi PPKM Darurat

JAKARTA (KR) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta manajemen perusahaan dan pekerja/buruh untuk mematuhi kebijakan Pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.

"Kebijakan Pemerintah untuk memberlakukan PPKM Darurat adalah ikhtiar terbaik untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Semua pihak harus mematuhi untuk keselamatan kita bersama, karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama," kata Ida di Jakarta, Minggu (4/7).

Menaker menginstruksikan para pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah untuk turut membantu pelaksanaan Satgas Covid-19 dalam mengawal pelaksanaan PPKM Darurat di daerahnya masing-masing.

Menurutnya, kedisiplinan semua pihak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam PPKM Darurat, adalah bagian dari upaya perlindungan atas keberlangsungan usaha, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja di tempat kerja. "Kita utamakan kesehatan dan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya sudah membaik, kita harapkan produktivitas kerja dan kelangsungan usaha akan berangsur pulih, dan perekonomian juga berangsur kembali normal," tutur Ida.

Dengan mengikuti aturan PPKM Darurat dan menjalankan protokol kesehatan, diharapkan bisa menghentikan penyebaran Covid-19 klaster tempat kerja. Di sisi lain, ia juga meminta para pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh untuk meningkatkan dialog sosial dan saling bekerja sama untuk bertahan dalam menghadapi pandemi ini.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan, PPKM Darurat Jawa-Bali diterapkan untuk menjaga keselamatan rakyat dari penyebaran Covid-19 yang tinggi akhir-akhir ini. "Dengan semakin tingginya kasus Covid-19 maka dilakukan pembatasan pergerakan orang. Memang tidak nyaman tapi ini semua untuk menjaga keselamatan rakyat sebagai hukum yang tertinggi," kata Sigit. (Fu/Ati)-f



Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menikmati makan siang di tempat parkir Pos PJR Tol Pemalang.

DILARANG MAKAN DI WARUNG

Ganjar 'Maksi' di Parkiran

PEMALANG (KR) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunjukkan konsistensinya terhadap larangan makan di warung/rumah makan. Saat melakukan kunjungan kerja di Pemalang, Ganjar memilih makan siang (maksu) dengan bekal yang dibawanya di parkiran kendaraan, sambil ditemani beberapa kucing liar.

Hal itu dilakukan Ganjar Pranowo usai inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Minggu (4/7). Saat mobil yang ditumpanginya masuk Pintu Tol Pemalang, Ganjar minta sopirnya berhenti sebentar di Kantor PJR di samping pintu masuk Gerbang Tol Pemalang itu.

Ganjar langsung menuju masjid untuk Salat Ashar. Usai salat, kembali masuk ke mobil dan mengambil sebuah kotak kecil warna putih berisi menu makan siang. Ganjar kemudian menuju parkir mobil polisi dan menikmati maknnya di tempat itu dengan duduk tanpa alas. Ransum maksu tersebut berupa nasi putih dan dua tempe goreng berukuran kecil, serta sayur lodeh.

Beberapa ekor kucing liar mendekatinya dan meminta 'jatah' makanan. "Wah kucingnya njaluk jatah (kucingnya minta jatah). Saya numpang makan di sini ya Pak. Ayo Pak ikut makan, itu ada nasi kotak diambil. Maknnya di sini saja. Jaga jarak ya," ucap Ganjar kepada petugas polisi yang mengawalinya.

Ganjar mengatakan, sebenarnya ia sempat diajak makan siang oleh Walikota Pekalongan. Namun dengan halus ditolaknya dan disampaikan sudah bawa bekal dari rumah.

"Saya tadi mau berangkat juga bingung, nanti makan siang di mana. Kan PPKM Darurat ndak boleh makan di warung. Ternyata istri saya bawain bekal dari rumah. Jadi sekarang saya sudah bawa bekal. Nanti gampang, saya makan di jalan," kata Ganjar kepada Walikota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid.

Aksi Ganjar makan siang di parkiran Pos PJR Gerbang Tol Pemalang itu membuat beberapa petugas kebingungan. Mereka tidak menyangka, yang sedang makan di parkiran adalah orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah.

(Bdi/Riy)-f

Pandemi, Kebutuhan Obat Meningkat

JAKARTA (KR) - Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Covid-19. Harga Eceran Tertinggi (HET) tersebut merupakan harga jual tertinggi obat di apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang berlaku di seluruh Indonesia.

Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan, sudah seharusnya Pemerintah dalam hal ini Kemenkes mengeluarkan aturan untuk melindungi konsumen. "Supaya konsumen tidak dieksploitasi oleh oknum-oknum nakal dan para pecundang yang merusak pasar," tandas Tulus Abadi, Minggu (4/7).

Di sisi lain, Tulus juga meminta Kemenkes tidak hanya mengeluarkan kebijakan soal HET, melainkan juga sanksi keras dan tegas bagi yang melanggarnya. Dengan demiki-

an, HET bukan hanya menjadi macan kertas saja dan gagal melindungi konsumen.

Meningkatnya kasus positif Covid-19 menjadikan kebutuhan obat-obatan yang dianggap potensial dan sudah dipakai dalam terapi Covid-19 meningkat. Ada 11 obat yang ditetapkan HET-nya oleh Kemenkes. Yakni Favipiravir 200 mg (tablet) Rp 22.500 per tablet, Remdesivir 100 mg (injeksi) Rp 510.000 per vial, Oseltamivir 75 mg (kapsul) Rp 26.000 per kapsul, Intravenous Immunoglobulin 5 persen 50 ml (infus) Rp 3.262.300 per vial, Intravenous Immunoglobulin 10 persen 25 ml (infus) Rp 3.965.000 per vial, Intravenous Immunoglobulin 10 persen 50 ml (infus) Rp 6.174.900 per vial, Ivermectin 12 mg (tablet) Rp 7.500 per tablet, Tocilizumab 400 mg/20 ml (infus) Rp 5.710.600 per vial, Tocilizumab 80 mg/4 ml (infus) Rp 1.162.200 per vial, Azithromycin 500 mg (tablet) Rp 1.700 per tablet, dan Azithromycin 500 mg (infus) Rp 95.400 per vial.

Pakar kesehatan dr Elizabeth Jane Soepardi MPH DSc mengingatkan, masyarakat untuk menggunakan obat berdasarkan resep dokter. Menurutny, dokter memilih obat untuk pasien ada dasar ilmiah dan aturannya. Menggunakan obat tanpa resep menjadi tanggung jawab pasien.

"Dokter buat resep artinya dia tanggung jawab, resep itu jadi alat bukti kalau dokter itu ternyata salah," tegas Doktor Bidang Penelitian Pelayanan Kesehatan dari Erasmus University, Netherland ini.

Menurut Jane Soepardi, HET diterbitkan untuk mengatasi masalah harga yang tidak terkendali karena tingginya permintaan. Dan memang sudah tugas Pemerintah untuk mengendalikan harga obat. Ia juga mendorong Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi pelaksanaannya. "Negara kendalikan (harga) supaya tidak ganggu upaya pengendalian pandemi. Yang melanggar (HET) dipenalti," katanya. (San)-f

MENINGGAL DI LOKASI GALIAN C

Lereng Longsor Tumini Tertimbun



Proses evakuasi korban penambangan galian C di Liyangan, Temanggung.

TEMANGGUNG (KR) - Penambangan liar di lereng Gunung Sindoro di Dusun Liyangan Desa Liyangan Kecamatan Ngadirejo Temanggung membawa korban, Minggu (4/7). Kali ini adalah Tumini (63), warga dusun setempat.

Keterangan yang diperoleh dari lokasi kejadian menyebutkan, Tumini bersama sejumlah warga lainnya, di antaranya Giyuk (47), Par dan Jumi Minggu siang sekitar pukul 10.30 WIB, hendak menyelemp split di lokasi galian C milik Gopar warga

Dusun Liyangan.

Tanpa disadari lereng yang mengeluarkan air jebol dan terjadilah longsor hingga menimpa korban yang berada di bawahnya. Sejumlah saksi berhasil menyelamatkan diri. Mereka lantas melaporkan kejadian itu kepada penambang lain dan meminta bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Totok Nursetyanto mengatakan BPBD, relawan, TNI dan Polri meluncur ke lokasi untuk mengevakuasi korban yang tertimbun material. Tebing yang longsor setinggi 10 meter dan lebar sekitar 7 meter. "Material menimbun korban dan setelah berjuang akhirnya dapat dievakuasi. Korban sudah meninggal dengan sejumlah luka di tubuhnya," kata Totok Nursetyanto

Tim Inavis Polres Temanggung telah melakukan pemeriksaan pada tubuh korban yang kemudian menyerahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. "Keluarga telah menerima kejadian itu sebagai musibah," katanya. (Osy)-f

PENUMPANG BUS DAN KA TURUN DRASTIS

Alun-alun Wates Ditutup Sementara

KULONPROGO (KR) - Aktivitas di Alun-alun Wates (Alwa), Kabupaten Kulonprogo, untuk sementara waktu ditutup 3-20 Juli 2021, sejalan dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Karena itu aktivitas perdagangan, olahraga, permainan anak tidak diperbolehkan dulu. Bukan berarti kita melarang orang untuk olahraga, tetapi lebih baik dilakukan di rumah saja," ujar Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo saat menutup kawasan Alwa, Minggu (4/7) sore. Bupati didampingi Wabup yang juga Ketua Gugus Tugas, unsur Polres, Kodim, SatPol PP, serta lainnya.

"Mari ini kita jadikan PPKM Darurat ini untuk keselamatan kita semua, tidak hanya untuk kepentingan orang per-orang, tetapi kita semua mendukung ini. Kita ingin dengan kebijakan PPKM Darurat dari Kemendagri, Instruksi Gubernur DIY dan Instruksi Bupati ini betul-betul kita dukung sepenuhnya," ujar Sutedjo.

Menurutnya, Alwa merupakan fasilitas umum/publik baik layanan kuliner, permainan anak-anak, maupun olahra-

ga. Diharapkan dukungan semua pihak agar pandemi bisa segera turun.

"Nanti akan ada penjagaan, dari Pol PP, TNI/Polri serta unsur lainnya. Kita terus adakan satuan terpadu untuk memantau. Sabtu malam juga sudah diadakan pemantauan. Ketegasan dari pelaksanaan ini, siapapun sudah tersosialisasikan, tentu ada sanksinya, bisa sanksi pidana," tandas Sutedjo.

Sementara itu, situasi lalu lintas secara umum di Kota Wates dan wilayah Kulonprogo pada Minggu (4/7) relatif menurun dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Pemantauan dilakukan di terminal, agen-agen bus dan stasiun, para pengelola dan operator sudah mengetahui adanya PPKM Darurat terutama berkaitan persyaratan perjalanan.

"Penumpang bus dua hari terakhir baik berangkat dari dan menuju Wates menurun drastis. Demikian pula kereta api, ada penurunan rata-rata 50 persen, baik keberangkatan maupun kedatangan. Bahkan sudah ada beberapa kereta api yang membatalkan keberangkatan," kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kulonprogo Drs Bowo Pristiyanto.

(Wid/Rul)-f

DUKUNG PPKM DARURAT JAWA-BALI

Kadin DIY Proaktif Tangani Pandemi

YOGYA (KR) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY menghargai dan mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Hal itu sebagai satu bentuk upaya paripurna untuk mengatasi situasi darurat Covid-19 di Jawa dan Bali yang bisa mengancam keselamatan dan keutuhan masyarakat.

"Pengendalian Covid-19 di Jawa dan Bali ini merupakan kepentingan bersama yang sepatutnya kita dukung penuh. Kadin DIY telah dan akan selalu berperan proaktif sebagai salah satu pilar pentahelix, yaitu sektor swasta dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN)," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Kadin DIY Bidang Organisasi dan Keanggotaan Robby Kusumaharta, Minggu (4/7).

Robby mengatakan, peran proaktif Kadin DIY ditunjukkan melalui Gugus Tugas Jogja Economic Resilience for Covid-19 (JERCovid) yang sudah terbentuk 20 Maret 2021. Gugus Tugas JERCovid ini telah memberikan kontribusi penanganan pandemi khususnya di DIY melalui pemberian

dukungan puluhan ribu masker, alat pelindung diri (APD) dan sebagainya. Kadin DIY bersama Pemda DIY melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY, Dinas Koperasi dan UKM DIY maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY beserta sekitar 25 asosiasi dunia usaha di DIY, telah menjalankan program percepatan vaksinasi massal bagi UMKM dan dunia usaha putaran pertama di Jogja Expo Center pada 20-24 Juni 2021. "Kami pun mengadakan vaksinasi di beberapa perusahaan dengan jumlah total sasaran 28.978 orang," tuturnya.

Kadin DIY dan Dinkes DIY telah menghasilkan komitmen asosiasi laboratorium kesehatan dan dunia usaha sektor esensial mendukung kesehatan untuk bersama meningkatkan kapasitas testing semaksimal mungkin. Di samping itu, permasalahan kelangkaan persediaan oksigen dan obat bagi penanganan Covid-19 akan dikoordinasikan lintas sektor terkait serta dunia usaha di DIY. Pihaknya mendukung penuh dan mendorong dunia usaha di DIY mematuhi aturan PPKM Darurat secara tertib. (Ira)-f

Bantu 30 Ton Oksigen di Jateng-DIY

SEMARANG (KR) - Melihat kebutuhan oksigen yang semakin tinggi sejalan dengan melonjaknya kasus positif Covid-19, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk sebagai Subholding Gas dari Holding Migas PT Pertamina (Persero) membantu Pemmerintah upaya penanganan pandemi Covid-19 melalui Program Pertamina Peduli.

PT Pertamina Gas (Pertagas), PT Pertagas Niaga dan PT Gagasan Energi Indonesia (Gagas) memberikan bantuan oksigen medis dan storage oxygen medis (tabung penyimpanan oksigen).

Pertagas telah membentuk Tim Tanggap Darurat Bantuan Oksigen guna persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan monitor-



Bantuan oksigen didistribusikan ke RS di Jateng dan DIY.

ing serta menyerahkan bantuan ke wilayah Jawa Tengah dan DIY. Di Jateng total 14,8 ton oksigen diserahkan ke RSUD Loekmono Hadi, RSUD Dr Soedjati Soemodiarjo, RSUD RAA Soewondo, dan RSUD Dr Soetrasno. Sedangkan di DIY sebanyak 15,1 ton oksigen diserahkan

ke RSUD PAU Harjodulokito, RS Panti Rapih, RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, RSUD Bantul, RS PKU Bantul, dan RS PKU Gamping.

Penyerahan bantuan oksigen medis ini menggandeng sejumlah stakeholder, seperti Samator Group yakni PT Aneka Gas Indus-

tri Kendal dan PT Samator & Industri Yogyakarta untuk distribusi bantuan ke rumah sakit. Untuk penyediaan gas dan transportasi bekerja sama dengan PT Etkom Inti Energi, Kemenkes dan Satgas Oksigen Jawa Tengah untuk data support dan kebijakan distribusi.

PT Pertagas Niaga juga melakukan konversi LNG Trucking idle sebanyak 6 unit selama 2 bulan untuk pengangkutan dan pendistribusian oksigen ke berbagai rumah sakit di Jawa.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, Minggu (4/7) mengungkapkan, Subholding Gas Grup berupaya mengerahkan kapasitas yang dimiliki untuk turut membantu upaya peningkatkan suplai oksigen medis. (Cha)-f